



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN

NOMOR 07/PENG/PIM/RH.01.02/08/2022

TENTANG

PENERIMAAN USULAN CALON HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022/2023

Memenuhi permintaan Mahkamah Agung RI sesuai Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor 25/WKMA.NY/SB/8/2022 tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial kembali mengundang Mahkamah Agung, Pemerintah, dan Masyarakat untuk mengusulkan warga negara terbaik untuk menjadi **Calon Hakim Agung Kamar Perdata, Kamar Pidana, Kamar Agama, Kamar Tata Usaha Negara (TUN) dan Kamar TUN khusus pajak** yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Hakim Karier

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
4. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
6. Berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi; dan
7. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

b. Nonkarier

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu sesuai dengan kamar yang dipilih dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
4. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
6. Berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. Tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin.

Pendaftaran Calon Hakim Agung dilakukan secara daring melalui laman rekrutmen.komisiyudisial.go.id mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan 20 September 2022. Berkas persyaratan yang harus disiapkan calon sebagai berikut:

1. Surat pengusulan;
2. Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan/atau pengalaman organisasi dibuat di atas kertas bermeterai;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
4. Pasfoto terbaru (dengan latar belakang warna merah) berukuran maksimal 100 kb diunggah di laman pendaftaran rekrutmen.komisiyudisial.go.id;

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450
Telp. : (021) 3905876/77, Fax. (021) 3906215
website: www.komisiyudisial.go.id, email: kyri@komisiyudisial.go.id

5. Fotokopi ijazah beserta transkrip nilai:
 - a. Strata 1 dan Strata 2 serta Strata 3 (jika ada) yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang bagi calon hakim agung dari jalur karier;
 - b. Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang bagi calon hakim agung dari jalur non karier;
6. Surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah;
7. Surat pernyataan pengalaman dalam bidang hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun dibuat di atas kertas bermeterai dengan melampirkan:
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan awal dan akhir bagi calon hakim agung dari jalur karier;
 - b. fotokopi surat keputusan pengangkatan/kontrak/perjanjian kerja secara lengkap sejak awal hingga akhir bagi calon hakim agung dari jalur non karier;
8. Surat pernyataan tidak akan merangkap jabatan dan menjadi pimpinan/pengurus partai politik atau organisasi massa yang memiliki afiliasi dengan partai politik, atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan jika diterima menjadi hakim agung, dibuat di atas kertas bermeterai;
9. Surat pernyataan kesediaan mengikuti proses seleksi calon hakim agung dan bersedia menerima segala keputusan yang diambil oleh Pleno Komisi Yudisial dibuat di atas kertas bermeterai;
10. Surat pernyataan kamar peradilan yang dipilih (Perdata/Pidana/Agama/Tata Usaha Negara) dibuat di atas kertas bermeterai;
11. Surat pernyataan tidak pernah mengikuti seleksi calon hakim agung dua kali secara berturut-turut dibuat di atas kertas bermeterai;
12. Lembar Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari KPK;
13. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
14. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri setempat, bagi calon hakim agung dari jalur non karier; dan
15. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara atau sanksi pelanggaran disiplin dari instansi/lembaga asal calon.

Berkas terkait persyaratan dipindai dan disimpan dalam format PDF kemudian diunggah di laman rekrutmen.komisiyudisial.go.id paling lambat tanggal 20 September 2022.

Seleksi dilakukan secara bertahap, meliputi: seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, dan wawancara.

Ketentuan lain-lain:

1. Bagi calon yang telah mengikuti Seleksi Calon Hakim Agung dua kali berturut-turut tidak dapat mengikuti seleksi periode ini;
2. Panitia Seleksi **tidak menerima pendaftaran secara langsung** di Kantor Komisi Yudisial. Pertanyaan terkait pendaftaran online dan proses seleksi dapat disampaikan melalui alamat surat elektronik rekrutmen@komisiyudisial.go.id atau fasilitas chat online di laman rekrutmen.komisiyudisial.go.id;
3. Berkas pengusulan yang sudah dikirim kepada Panitia Seleksi tidak dapat dikembalikan;
4. Peserta seleksi yang memenuhi persyaratan administratif akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya;
5. Dalam proses seleksi, peserta tidak dipungut biaya apapun;
6. Peserta seleksi diminta untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan/kelulusan dalam proses seleksi;
7. Formulir-formulir surat pernyataan dan daftar riwayat hidup dapat diunduh di laman rekrutmen.komisiyudisial.go.id setelah menyelesaikan pengisian data pendaftaran.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Agustus 2022

Ketua,



Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum